**PENGARUH *NIHON GO* DALAM PENGEMBANGAN SKILL TENAGA KERJA
INDONESIA (*KANGOSHI* DAN *KAIGOFUKUSHISHI*)
DI MAKASSAR**

Oleh

Fivi Elvira¹, Marini²

Email: fivi.elvira@universitasbosowa.ac.id dan marini@universitasbosowa.ac.id

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Bosowa

ABSTRAK

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kebutuhan akan SDM berkualitas dari luar negeri sudah terbuka lebar dalam bentuk kerjasama. Di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Makassar (Sulawesi-Maluku-Papua) atau disingkat BP3TKI Makassar bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja yang bekerja secara bersama dalam pengiriman TKI ke luar negeri termasuk program *G to G* ke Jepang semakin berkembang. Tenaga Kerja Indonesia (*nurse and career giver*) sering mengalami kendala khususnya pada masalah daya saing, kemampuan akademik dan juga dalam bahasa Jepang. Pengaruh *Nihon Go* dalam Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Indonesia di Makassar menjadi salah satu faktor penting yang TKI harus kembangkan sebelum berangkat. Diharapkan menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan mampu terserap di lingkungan perusahaan atau rumah sakit. Hasil kegiatan penelitian mengenai pengaruh *nihon go* akan mendapatkan suatu model cara tepat atau solusi pengaruh bahasa Jepang bagi pengembangan skill TKI. Selain itu peneliti berharap pengaruh bahasa Jepang dapat memberikan pemahaman budaya Jepang akan kedisiplinan dan kemandirian calon TKI melalui pemahaman manajemen *shock culture* Jepang yang memiliki kebudayaan yang sangat unik dan disiplin.

Kata Kunci: *TKI, Kangoshi, Kaigofukushishi, Nihon Go, EPA*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia. Indonesia menempati peringkat ke empat jumlah penduduk terbanyak di dunia, yang berarti jumlah penduduk memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah faktor utama yang dapat mengatasi isu yang terjadi pada negara berkembang termasuk Indonesia. Tenaga kerja Indonesia menghadapi banyak masalah khususnya TKI yang belum atau tidak mempunyai keterampilan dan keahlian kemudian mereka memaksa diri berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Pekerja merupakan salah satu isu terbesar yang harus dihadapi oleh negara berkembang dan negara maju terhadap kebutuhan industri.

Pengiriman TKI juga memberikan devisa negara, akan tetapi ada banyak isu yang selalu muncul dimana berkaitan dengan masalah pekerja. Selain disebabkan oleh hal

yang berkaitan dengan keterampilan dan pemahaman mengenai etos kerja yang dimiliki TKI untuk negara tujuan juga sering menghadapi masalah.

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah pada penelitian pengaruh bahasa asing dalam meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia di Makassar. Melihat dengan pengaruh bahasa asing merupakan salah satu faktor untuk pengembangan skill bagi calon TKI juga memberikan pembelajaran terkait budaya lokal.

Salah satu Persyaratan calon TKI adalah perlunya sertifikat kemampuan bahasa yakni bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Tenaga Kerja Indonesia sering mengalami kendala khususnya pada masalah daya saing, kemampuan akademik dan juga dalam bahasa Asing. Dengan penggunaan Bahasa Asing secara intensive dalam meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia di Makassar diharapkan menjadi tenaga kerja

yang siap pakai dan mampu terserap di lingkungan perusahaan.

Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena masalah TKI ini bukan hanya mejadi masalah negara atau pemerintah tetapi menjadi masalah kita bersama. Dari tingkat pemerintah yakni Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Organisasi Masyarakat, NGO, Para akademisi, dan Keluarga.

Peneliti berharap dengan penggunaan *nihon go* secara intensif dalam meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia di Makassar mampu menjawab salah satu persoalan dalam polemik TKI kita. Perlu dilakukan pendekatan secara berkala di setiap elemen pemerintah terkait dengan penanganan masalah TKI dalam pelatihan Bahasa Asing untuk menunjang skill dan kemampuan calon TKI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Orientasi *nihon go* dalam pengembangan skill calon tenaga kerja Indonesia di Makassar.
2. Pemantapan *Nihon Go* bagi calon TKI pada program kerjasama G to G antara Indonesia dan Jepang.

Berlandaskan pada masalah di atas, maka ada dua pertanyaan sebagai dasar dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Apa dampak yang akan ditimbulkan dengan pemantapan penggunaan *nihon go* dalam pengembangan skill TKI di Makassar ?
2. Bagaimana konsep *nihon go* yang baik untuk para calon TKI ?

C. Konsep Penelitian

Peneliti menawarkan konsep Minna no Nihongo dalam pengembangan skill calon TKI di Makassar. Peneliti melihat dari batasan dan rumusan masalah tersebut sangat cocok konsep tersebut untuk pengajaran kemampuan dasar bahasa Jepang, percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang, pengetahuan budaya Jepang dan juga manajemen *shock culture* yang sering menjadi kendala ketika bertemu langsung dengan masyarakat Jepang.

Hubungan persahabatan Indonesia dan Jepang secara resmi dimulai sejak ditandatanganinya Traktat Perdamaian 20 Januari 1958 dan mulai berlaku April 1958 dan kini hubungan itu juga telah beranjak jauh, baik hubungan diplomatik, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian, tahun 2008 merupakan ulang tahun ke-50 pembukaan hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Selama kurun waktu 50 tahun ini, antara kedua negara telah dibangun hubungan persahabatan dan kerjasama secara luas. Tahun persahabatan Indonesia – Jepang diharapkan memperluas pertukaran antara rakyat kedua negara dan memperdalam saling pengertian antar generasi. Selama “tahun persahabatan Indonesia – Jepang”, diselenggarakan pertukaran di berbagai bidang luas yang mencakup pendidikan, ekonomi, sains dan teknologi, kebudayaan, kesenian, olahraga dan pertukaran rakyat.

Pada bulan November 2006, telah ditandatangani pernyataan bersama Republik Indonesia – Jepang (Kemitraan Strategis Menuju Masa Depan Yang Damai dan Sejahtera). “Tahun Persahabatan” sebagai tahun peringatan dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara, merupakan kesempatan yang sangat baik untuk lebih memperkokoh hubungan persahabatan yang sudah berlangsung cukup lama. Dalam kerjasama ini, ditegaskan pentingnya menyelenggarakan berbagai macam acara peringatan yang bertujuan memperluas pertukaran antara rakyat kedua negara dan memperdalam saling pengertian lintas generasi.

Pada 20 Agustus 2007, kembali ditegaskan bahwa tahun 2008 merupakan awal yang penting guna lebih memajukan hubungan antara Jepang dan Indonesia. Dimana pada tahun ini akan terjalin kerjasama yang lebih luas, mencakup 11 sektor. Diharapkan kerjasama ini dapat berlangsung dengan efektif sehingga dapat diraih suatu lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pembangunan ekonomi yang lebih baik.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang akan diberikan penggunaan *nihon*

go dalam pengembangan skill TKI di Makassar.

2. Untuk mengetahui budaya lokal Jepang dalam menjawab *shock culture* bagi para calon TKI

II. KAJIAN LITERATUR

A. Tenaga Kerja

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai negara sumber tenaga kerja dengan potensi kerja yang sangat besar, namun dapat menjadi pendorong terjadinya berbagai kesulitan bilamana mereka tidak dapat ditempatkan dengan baik. Jumlah pengangguran yang besar merupakan sumber dari potensi konflik yang besar pula.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No. 13/2003), sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 angka 3 UU no. 13/2003). Pasal 31 UU No. 13/2003 menyatakan, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Permenaker No. 4 Tahun 1970, memberikan pengertian tentang pengerahan tenaga kerja sebagai tiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan supaya orang mengadakan perjanjian kerja untuk dipekerjakan, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur oleh UU. Sebelum UU mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diundangkan maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri tetap berlaku (pasal 34 UU No. 13/2004).

B. Perdagangan Bebas

Setelah perang dunia II konsep global perdagangan bebas dimulai digabungkan pada saat pembangunan ekonomi dunia dimulai. Sejak 1930 sistem perdagangan dunia cenderung menjaga proteksi, ini yang

melatarbelakangi terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) di 1947 yang diinisiasi oleh beberapa Negara-negara industri. Diawal 1948-1994 GATT merumuskan dan mengimplementasikan aturan-aturan pada pertumbuhan perdagangan dunia untuk menghasilkan. Walaupun, GATT bukan sebuah organisasi sebaliknya sebuah perjanjian, dimana struktur organisasi termasuk pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1 January 1995.

Tujuan GATT adalah untuk mendorong perdagangan bebas dengan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang tidak menimbulkan dampak-dampak sampingan. Selain menyediakan forum negosiasi perdagangan internasional yang lebih permanen untuk melakukan perundingan perdagangan dan mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional juga sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa demi terciptanya suatu liberalisasi perdagangan internasional.

C. Hubungan Bilateral

Hubungan antar negara melibatkan negara sebagai subjek dan mempunyai berbagai macam jenis. Hal ini dapat dilihat melalui sifat hubungan maupun ruang lingkungannya. Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan keamanan politik, budaya, dan struktur ekonomi.

Negara-negara yang melakukan perdagangan Internasional karena didasari oleh dua alasan yaitu, pertama negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain, bangsa-bangsa sebagaimana individu-individu dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan-perbedaan mereka melalui suatu pengaturan dimana setiap pihak melakukan dengan relatif lebih baik. Kedua, negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi. Kedua motif tersebut mencermati interaksi dari pola-pola perdagangan internasional.

Dalam hubungan internasional khususnya hubungan bilateral, Negara-negara dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional. Upaya suatu negara

mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain didasarkan dengan pertimbangan hubungan yang mendatangkan keuntungan yang lebih utama dalam mewujudkan pencapaian kepentingan nasional dan tujuan internasional, sebagai cita-cita sebuah negara.

Kerjasama politik antara negara merupakan aspek penting yang tidak dapat dihindarkan dari hubungan bilateral. Persoalan ini secara umum sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek hubungan antar negara. Bentuk hubungan antar negara terutama dalam bidang politik, berpengaruh pada bangunan dasar kerjasama regional dalam segala aspek kehidupan. Makin harmonis hubungan politik antar negara makin terbuka bagi negara-negara bersangkutan bagi terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini pada gilirannya negara-negara terkait dapat melengkapi kekurangan masing-masing terutama dalam memenuhi dan merealisasikan kepentingan nasionalnya.

Clip Archer mengemukakan bahwa: organisasi internasional merupakan struktur melalui perjanjian, antara anggota-anggotanya (baik antar pemerintah, maupun lembaga non pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk bekerjasama mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan yang disepakati bersama.

D. Interdependensi

Dalam hubungan internasional terdapat sistem internasional yang tidak terlepas dari masalah politik dan ekonomi. Isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi yang merupakan elemen-elemen interdependensi yang kompleks, karena keduanya saling berinteraksi.

Interdependensi tersebut dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Saling ketergantungan mengacu pada situasi yang dikarakteristikan dengan adanya efek resiprokal antara negara atau antara aktor negara yang berbeda, dimana efek ini kerap kali merupakan hasil dari transaksi internasional, yaitu aliran arus barang, uang, manusia, dan informasi yang melewati batas Negara. Dalam mengamati fenomena interdependensi, terdapat beberapa sektor ekonomi dan politik dalam hubungan interdependensi antar negara, yakni sektor pengembangan SDM, perdagangan, investasi, finansial dan politik.

Dalam interdependensi keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama berpijak pada dua hal yakni *power* dan kemampuan tawar menawar, dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Hal ini dikarenakan meski dalam teorinya hubungan interdependensi mengarahkan pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi. Karena itu *power* aktor dalam hubungan interdependensi akan beragam sesuai dengan isunya. Kemudian, rezim internasional akan bertumpu pada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi-politiknya dalam mencapai kesepakatan di antara mereka. Ada empat cara faktor politik mempengaruhi ekonomi, yaitu:

1. Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional.
2. Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi.
3. Kebijakan-kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik.
4. Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses dimana negara-negara dan aktor non negara mengatur konflik dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

E. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara, bahkan sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri dengan fungsi untuk evaluasi. Suatu negara mengambil kebijakan luar negeri terhadap negara tertentu dilatar belakangi atau dimotivasi akan adanya kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri Jepang melalui EPA di Indonesia tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yaitu menjamin kelancaran pasokan (supply) bagi kebutuhan pasarnya. Sedangkan Indonesia tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya juga, yakni dengan berbagai bantuan Jepang, Indonesia mampu memanfaatkan semaksimalnya. Begitu pula halnya dengan kebijakan luar negeri negara-negara lainnya, dimana

pada umumnya berorientasi pada kepentingan nasionalnya.

Para ilmuwan maupun praktisi hubungan internasional sepakat bahwa alasan utama bagi tindakan suatu negara semuanya mengarah pada kepentingan nasional. Oleh karena itu strategi kebijakan suatu negara harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologis yang dianggapnya utopis, bahkan cenderung berbahaya. Sehubungan dengan hal tersebut, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Pemahaman tentang kepentingan nasional hanya dapat diketahui melalui konseptualisasi yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan antara lain: “kepentingan nasional (national interest) adalah konsep mengenai hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dan sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri yaitu untuk kepentingan evaluasi” (T.A Coulombis dan J.H Wolf).

Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan pada pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Timbulnya kepentingan nasional disini sebagai konsekuensi dari hubungan internasional yang dilaksanakan melalui kebijakan politik luar negeri. Apabila

dikaitkan dengan diplomasi melalui kebijakan EPA, maka dari realisasi dari kebijakan luar negeri ini diharapkan terwujudnya kepentingan nasional pada sektor tersebut serta bisa membawa dampak terhadap sektor-sektor lainnya.

Pada dasarnya tindakan politik bukanlah fenomena yang terbatas, tepat dan bisa diobservasi dengan jelas sehingga konsep-konsep politik harus mencerminkan setepat-tepatnya kenyataan politik yang nampak masih abstrak. Sehubungan dengan hal itu muncullah pendapat yang mengartikan kepentingan nasional dalam arti minimum dan di luar minimum, yaitu: “Arti minimum kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara – negara melindungi fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain. Secara spesifik dapat pula dikatakan bahwa negara-negara harus bisa mempertahankan integritas teritorial (identitas politiknya); yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis, serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistik, dan sejarahnya” (Morgenthau).

Sedangkan pengertian kepentingan nasional di luar minimum adalah sebagai berikut : “Berbagai macam hal yang secara logis berpaduan dengannya. Isi konsep itu ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan didalam usaha suatu negara merumuskan politik luar negerinya. Faktor penting lainnya yang perlu diketahui menyangkut tentang kepentingan nasional yaitu mengenai masalah penggunaannya. Para ilmuwan hubungan internasional belum menemukan formula yang pasti tentang penggunaan kepentingan nasional karena ada diantara mereka yang beranggapan sebagai alat analisis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri.

“Konsep kepentingan nasional dengan berbagai penggunaannya dapat diklasifikasi ke dalam tiga kategori, yaitu : aspirasional, operasional, dan eksplanatori dan polemik. Pada tingkat aspirasional, kepentingan nasional dipakai untuk menunjukkan gambaran tentang kehidupan yang baik, serangkaian tujuan ideal, yang mungkin hendak dicapai oleh negara. Kebijakan disini tidak sedang dilaksanakan tetapi menunjukkan garis besar haluan kebijaksanaan tersebut. Apabila terjadi

peningkatan kemampuan negara atau terjadi perubahan yang menguntungkan dalam lingkungan eksternal yang dihadapi negara maka kebijaksanaan yang aspirasional bisa menjadi operasional. Sedangkan pada tingkat operasional, kepentingan nasional pada keseluruhan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang betul-betul dilaksanakan. Selanjutnya pada tingkat eksplanatori dan polemik, konsep kepentingan nasional dipakai untuk menjelaskan, mengevaluasi, merasionasi sasikan dan mengkritik politik luar negeri”.

Konsep kepentingan nasional disini diklasifikasikan dalam tiga kategori, dimana setiap tahapan mempunyai ketetapan jangka waktu dalam pelaksanaannya. Ditentukan bahwa faktor paling penting dalam politik luar negeri adalah hubungan timbal balik antara tahap aspirasional dan operasional dalam menentukan apa yang akan dicapai oleh negara pada lingkungan eksternalnya. Sementara segala hal yang belum dijelaskan pada tahap aspirasional dan operasional akan dijelaskan melalui tahap eksplanatori dan polemik. Dengan demikian, ketiga tahapan ini cenderung menjabarkan secara kompleks penggunaan konsep kepentingan nasional dalam menganalisa politik luar negeri setiap negara.

III. METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Peneliti mengklasifikasikan permasalahan yang ada dalam penggunaan bahasa Jepang (nihon go) dan konsep yang tepat digunakan adalah *Minna No Nihongo* pada calon TKI di Makassar karena ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jepang. Peneliti juga memperkenalkan konsep *Shock Culture Management* terhadap budaya lokal Jepang.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa lokasi, yakni:

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Makassar (Sulawesi-Maluku-Papua), BP3TKI Makassar.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Politeknik Kesehatan Pemerintah yang bekerjasama dengan BP3TKI.

6. Kantor Konsular Jepang di Makassar.

C. Perubahan yang Diamati

Peneliti membandingkan sebelum dan setelah penggunaan konsep *minna no nihongo* dan konsep *shock culture management* untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang para calon TKI, khususnya *kangoshi* dan *kaigofukushishi*.

D. Model yang Digunakan

Peneliti menggunakan konsep *Minna No Nihon Go* dengan model *Bunpo*, *Cyokai*, dan *Dokai*. Konsep *Shock Culture Management* untuk pengenalan *Bunka* (budaya).

E. Rancangan Penelitian

Peneliti menyusun rancangan sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti mendata calon TKI
2. Peneliti membagi calon TKI ke dalam dua kelompok, yakni calon perawat (*Kangoshi*) dan *careworker* (*Kaigofukushishi*)
3. Peneliti membagi calon TKI berdasarkan kemampuan bahasa Jepang, yakni yang pernah ikut kursus, belajar sendiri (otodidak), dan yang tidak mengerti sama sekali bahasa Jepang.
4. Peneliti membagi calon TKI yang memiliki kemampuan bahasa asing lebih dari satu.
5. Peneliti memetakan kelompok berdasarkan tingkat bahasa Jepang mereka.

F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil *quiz* para calon TKI, pengambilan data diambil dari hasil *final test* calon TKI. Peneliti juga akan memperoleh data dari lokasi penelitian baik berupa literature, terbitan berkala baik buku, jurnal, majalah, bulletin, surat kabar maupun internet. Peneliti juga melakukan wawancara pada instansi terkait.

Jalur analisis data bersifat deduktif, dimana analisis dijabarkan dari pola-pola yang umum hingga yang khusus. Penelitian ini menggunakan pola perpaduan antara data primer dan sekunder. Peneliti tidak hanya terjun langsung ke lokasi dan bersentuhan langsung dengan calon TKI untuk melakukan penelitian akan tetapi peneliti juga menggunakan data yang disiapkan oleh

lembaga-lembaga atau badan pemerintah maupun swasta.

IV. PEMBAHASAN

A. Dampak Pementapan Penggunaan Nihon Go dalam Pengembangan Skill TKI (Kangoshi & Kaigofukushishi) di Makassar

Program *G to G* yang dilakukan antara pemerintah Jepang dan Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Program ini diberlakukan setelah penandatanganan kerjasama *Economic Partnership Agreement Indonesia – Japan* dengan menyepakati kerjasama di 11 (sebelas) sector, salah satunya kerjasama teknik dengan melakukan kerjasama pengiriman tenaga kerja dalam program magang yang dibagi dalam dua kelompok; *kangoshi (nurse)* dan *kaigofukushishi (care giver)*. Masing-masing memiliki tugas dan peran penting dalam program magang tersebut.

Setelah melewati beberapa tahapan pendaftaran online, tes kemampuan keperawatan & tes psikologi, interview, aptitude test & Japanese quiz, medical check up, matching I dan II yang keudian diikuti pelatihan Bahasa Jepang di Indonesia selama 6 (enam bulan) para calon tenaga kerja tersebut menghadapi tahapan ujian yang sangat intensive dan ketat.

Para pendaftar program *G to G* ini diseleksi dengan tahapan ujian yang tidak hanya untuk pengetahuan keperawatan akan tetapi pengetahuan bahasa Jepang. Pengetahuan bahasa ini sangat penting dikarenakan kedepannya para *Kangoshi* dan *Kaigofukushishi* ini akan berhadapan dengan masyarakat, perusahaan dan rumah sakit di Jepang.

Dalam program *G to G* ini ternyata bukan hanya persoalan bahasa yang menjadi pokok permasalahan dalam program ini akan tetapi pengetahuan dasar dan kemampuan ilmu keperawatan para pekerja dari Indonesia juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk lulus pada program ini. Memiliki pengetahuan dasar dan kemampuan ilmu keperawatan tidak menjadi jaminan untuk lulus karena para pendaftar diharuskan memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun bagi perawat dan untuk *care giver* harus melewati test intensive dari JICWELS (*Japan*

International Corporation of Welfare Services).

Bahasa Jepang yang diperlukan untuk lulus dalam tahapan ini adalah N5 atau *Go Noryouku Shiken*. Bagi calon TKI (*Kangoshi* dan *Kaigofukushishi*) yang tidak memiliki pengetahuan dasar bahasa Jepang tentunya akan sangat sulit untuk lulus ke tahapan berikutnya. Ini dikarenakan yang mengikuti program ini sebagian besar tidak memiliki pengetahuan dasar bahasa Jepang dan hanya kemampuan ilmu keperawatan. Tantangan bagi para calon TKI ini tidak hanya pengalaman dan pengetahuan yang lebih dibanding dari calon pekerja Negara lain untuk tujuan Jepang akan tetapi bahasa Jepang yang perlu ditingkatkan dan perlunya pengetahuan budaya lokal Jepang yang diperlu dipahami oleh para Tenaga Kerja Indonesia.

Orientasi pengenalan dan pembelajaran bahasa Jepang di sekolah keperawatan juga sangat diperlukan guna menunjang pengetahuan bahasa asing, perlunya ekstra kurikuler bahasa serta *private class* bahasa. Ini terbukti dari tahapan awal pendaftar di BP3TKI Makassar sebanyak 1337 *care giver* dan 305 *nurse* yang berkompetisi dari pendaftaran online yang kemudian tersaring menjadi 116 *care giver* dan 103 *nurse*. Sampai ditahapan interview yang dinyatakan lolos sebanyak 37 *care giver* dan 13 *nurse* di kota Makassar.

B. Konsep Nihon Go untuk Para Calon Kangoshi dan Kaigofukushishi

Tenaga Kerja Indonesia yang mengikuti program *G to G* ini berasal dari keluarga menengah yang mayoritas berasal dari kabupaten dan kota yang di dominasi oleh mahasiswa(i) lulusan Diploma III dan Sarjana Ners Keperawatan. Para TKI yang mendaftarkan ini termotivasi untuk memperbaiki nasib, kesukaan terhadap negara Jepang terkait dengan Anime dan Manga. Tenaga kerja Indonesia dituntut untuk bisa berbahasa Jepang dikarenakan akan beradaptasi dengan *user*.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini selain kemampuan ners keperawatan yang harus mampu berkompetisi, tingkat kemampuan penguasaan bahasa Jepang juga sangat penting dalam proses wawancara dan matching dengan perusahaan dan rumah sakit Jepang itu diharuskan mampu berbicara

dengan fasih dan memiliki nilai Japanese Language Proficiency Test (JLPT) dalam bahasa Jepang lebih dikenal dengan istilah Nihon Go Nouryokushiken level N5.

Bahasa Jepang menjadi salah satu kebutuhan pertama bagi para TKI untuk mampu beradaptasi dan bekerja di perusahaan dan rumah sakit tujuan yang ada di Jepang. Proses matching dengan berbagai perusahaan dan rumah sakit di Jepang menjadi penentu kelulusan para TKI ini untuk berangkat ke Jepang setelah melewati beberapa proses. Tenaga Kerja yang lolos seluruh Indonesia untuk *careworker* sebanyak 544 orang dan untuk *nurse* sebanyak 68 orang di tahap interview, *aptitude test* & Japanese quiz yang dilakukan oleh JICWELS.

Konsep Nihon Go untuk *Kangoshi* dan *Kaigofukushishi* bisa dilakukan dengan menggunakan konsep *Minna No Nihon Go* dengan model *Bunpo*, *Cyokai*, dan *Dokai*. Konsep *Shock Culture Management* untuk pengenalan *Bunka* (budaya). Ini merupakan tahapan awal untuk mempelajari bahasa Jepang secara perlahan sampai tahap intermediate bahkan untuk level advance.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesiapan tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke Jepang sudah memiliki standarisasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dan rumah sakit Jepang, termasuk kemampuan bahasa Jepang yang sudah lulus tes di N5 yang sudah dimiliki oleh para tenaga kerja. Proses seleksi sejauh ini dilakukan sangat ketat dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BNP2TKI bekerjasama dengan JICWELS dan Japan Foundation.

Diawal kesiapan para tenaga kerja Indonesia masih minim pengetahuan bahasa Jepang, yang dilakukan para tenaga kerja ini lebih kepada *self study*, kursus dan bahkan ada yang *intensive private*. Para tenaga kerja ini lebih fokus kepada persiapan tes kemampuan keperawatan dan tes psikologi, mereka mempersiapkan tes itu kurang lebih enam bulan. Para tenaga kerja lebih berpikir bagaimana bisa lulus tes tersebut setelah itu baru memikirkan bagaimana tes kemampuan bahasa Jepang.

Koordinasi dan pemahaman bagi BP3TKI/LP3TKI, BNP2TKI, JICWELS, Perusahaan-perusahaan, rumah sakit Jepang dan pihak swasta menjadi acuan dan bahan pertimbangan setelah melihat kemampuan dan skill para tenaga kerja Indonesia. Kemampuan keperawatan sangat penting namun bahasa Jepang juga harus dipahami dengan baik mengingat merek akan berinteraksi dengan penduduk setempat.

Keterlibatan alumni *Kangoshi* dan *Kaigofukushishi* tidak ada dalam program BNP2TKI ataupun BP3TKI, namun mereka diharapkan tetap mengembangkan bakat dan berdikari setelah mengikuti program G to G antara Indonesia dan Jepang.

B. Saran

Untuk Pemerintah sebaiknya membuat mekanisme atau aturan terkait dengan monitoring yang terkoordinasi bagi seluruh tenaga kerja sehingga dapat dipantau secara berkala oleh pemerintah setempat. Pemerintah juga menyediakan pelayanan yang cepat terkait kondisi kesehatan para tenaga kerja, sebaiknya pengenalan bahasa Jepang lebih diperkuat dan diperpanjang durasi belajar bahasanya. Sebaiknya ada koordinasi dan komunikasi yang baik terkait sistem pembelajaran yang diberikan selama enam bulan di Indonesia.

Untuk orang tua sebaiknya memberikan lebih banyak dukungan terhadap anak atau keluarga yang mendaftar, dukungan tidak hanya materi akan tetapi moril dikarenakan para tenaga kerja yang mendaftar ini melewati kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya proses seleksi dan 6 (enam) bulan belajar bahasa Jepang sebelum berangkat. Kondisi fisik dan jiwa para tenaga kerja dengan rentan waktu yang lama proses seleksinya dan sistem belajar bahasa Jepang yang intensif yang akan menguras energi dan emosi yang tentunya dorongan dan semangat dari orang tua dan keluarga akan sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Banyu Perwita., Yanyan Mochamad Yani, 2008. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Aneka Jepang, 2008. Edisi Khusus "Tahun Persahabatan" 50 Golden

- Year of Friendship 2008*. Indonesia – Jepang, Kedutaan Besar Jepang, Jakarta.
- Ayu Asrianti, 2007. Hubungan Bilateral Indonesia – Singapura di Bidang Perdagangan dan Investasi, Jurusan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional – FISIP Universitas “45” Makassar.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2012. Pengantar Hubungan Internasional. Amico: Bandung.
- Enry Maznidotcom, 2017. Program G to G Nurse (Kangoshi) dan Careworker (Kaigofukushishi) Tahun 2017. BP3TKI/LP3TKI/BNP2TKI.
- Erlangga Mizwar, 2008. Peranan Diplomasi Kebudayaan Dalam Upaya Meningkatkan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia. Universitas “45” Makassar.
- Fivi Elvira, 2009. Peranan EPA (*Economic Partnership Agreement*) Terhadap Peningkatan Investasi dan Perdagangan Indonesia. Ilmu Hubungan Internasional: FISIP Universitas “45” Makassar.
- Leny Fajir, 2006. Pengaruh Kebijakan Ekspor Mobil Jepang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Bidang Otomotif. FISIP Universitas “45” Makassar. MOFA, *Ministry of Foreign Affair, Japan*. 2010. *Joint Statement at the Signing of the Agreement Between Japan and Republic of Indonesia for an Economic Partnership*. Artikel (juli 2010, 22:11 p.m.)
<http://www.mofa.go.jp/region/asian-paci/indonesia/efa0708/joint.html>
- Sartono Lalu, 2007. Analisis Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. FISIP Universitas “45” Makassar.